

KAJIAN PEMBERDAYAAN PERAN PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN IRIGASI DI KABUPATEN KULONPROGO

Oleh:
Sri Sumardiningsih
Staf Pengajar FISE UNY

Abstract

This research aims at finding out the society's perception on the role of P3A Di Pengasih, on the role of women in P3A organization, and on the role of women in P3A Di Pengasih. It also aims at finding out the improvement of women's involvement in managing the irrigation.

This research is a descriptive-explorative research. Data collection is conducted by focused group discussion (FGD), interviews, questionnaires, and documentation.

The result of the data analysis shows that the society in Di Pengasih has good perception on the role of P3A. There is an improvement of the women's role in P3A. Before the effort of empowerment, the involvement of the women was only in paying the contribution fee at harvest and providing logistics when they had cooperative mass working cleaning the tertiary channel. After the implementation of the empowerment, the women play their role as members of P3A, by sharing their opinion in meetings, cleaning drains and channels, paying the contribution fee, attending the trainings, and using groups' cash. There is also an improvement in human resource. Before the implementation of the empowerment women's access was limited to land, irrigation, fertilizers, seeds, pesticides, and human power. Now, they are able to access the trainings, irrigation, fertilizers, seeds, pesticides, human power and marketing. However, there is no improvement on the control on human resource by women.

Keywords: empowerment, Role, women, irrigation

PENDAHULUAN

Semangat paradigma desentralistik meluas tidak hanya pada kewenangan pemerintahan, tetapi hampir dalam setiap perikehidupan. Perubahan lingkungan strategis ini apabila dapat

dikelola dengan baik dan benar akan menjadi tantangan dan peluang kemajuan. Termasuk dalam pengelolaan irigasi, dengan Inpres Nomor 3 Tahun 1999 dan usulan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 pengelolaan irigasi telah memasuki tahapan desentralisasi.

Walaupun Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1999 tidak menyebutkan masalah pemberdayaan perempuan dalam sektor irigasi. Tapi dirasakan bahwa selama ini peran serta ataupun partisipasi perempuan dalam proses implementasi Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI) sangat kurang. Untuk itu diperlukan suatu kajian pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan irigasi agar dapat mewujudkan pengelolaan sistem irigasi yang efisien, efektif dan berkelanjutan melalui peran serta aktif masyarakat/P3A dengan kesempatan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan serta menciptakan kepedulian isu gender dalam pengelolaan irigasi.

Ada beberapa hal yang sangat penting berkaitan erat dengan membangun peran kelembagaan petani untuk mengelola air irigasi, yaitu membangun kemampuan pengembangan inti dan peluang usaha. Membangun kemampuan mengandung arti belum ada, sedangkan menguatkan mengandung arti meningkatkan kemampuan kelembagaannya. P3A sudah cukup lama didengar keberadaannya, namun dari segi partisipasi kemampuan mengelola air irigasi belum nampak. Disamping itu kinerjanya masih sangat terbatas, kemungkinan pengetahuan bersama akan kebutuhan air belum dimengerti secara merata. Sehingga meskipun sudah terdapat kelembagaan formalnya, namun masih diperlukan upaya pemahaman bersama tentang hak dan kewajiban petani baik petani laki-laki maupun perempuan atas air irigasi yang digunakan sebagai sumberdaya usaha taninya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengambil kebijakan yang terkait dengan pengelolaan irigasi dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi dan keberkelanjutan melalui peran serta aktif masyarakat dengan

memberikan kesempatan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan.

Cara Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif. Penelitian dilakukan pada Daerah Irigasi (DI) Pengasih Timur terdiri dari 22 Unit Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Sampel responden diambil dari masing-masing Unit P3A satu orang. Jadi sample responden ada 22 orang.

Data dikumpulkan melalui FGD (*focused group discussion*) dan wawancara, serta angket atau questionare. Selain itu juga digunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data-data sekunder yang terkait. Analisis data dilaksanakan dengan teknik statistik deskriptif kuantitatif dan teknik deskriptif kualitatif.

Untuk data kuantitatif persepsi masyarakat terhadap peran P3A dikategorikan dengan norma sebagai berikut:

$> (M_i + 1,5 Sd_i)$: Baik
M_i sampai dengan $(M_i + 1,5 Sd_i)$: Cukup Baik
$(M_i - 1,5 Sd_i)$ sampai dengan M_i	: Kurang Baik
$< (M_i - 1,5 Sd_i)$: Tidak Baik

Keterangan:

M_i : Harga Mean Ideal

Sd_i : Simpangan Baku Ideal, (Sutrisno Hadi, 1992: 135)

PEMBAHASAN

Hasil analisis data menunjukkan persepsi masyarakat terhadap peran perempuan di dalam P3A tergolong dalam kategori kurang baik. Temuan ini dibahas melalui sub- subvariabel persepsi masyarakat terhadap peran perempuan dalam P3A, yakni persepsi terhadap petani perempuan sebagai anggota P3A, persepsi terhadap hak dan kewajiban petani perempuan dalam P3A, persepsi terhadap petani perempuan sebagai pelaksana teknik dan persepsi petani perempuan sebagai ketua blok. Persepsi masyarakat terhadap subvariabel petani perempuan sebagai anggota P3A dan hak

kewajiban petani perempuan termasuk kategori cukup baik. Namun, untuk subvariabel petani perempuan sebagai pelaksana teknik dan sebagai ketua blok dalam P3A termasuk dalam kategori tidak baik.

Peran P3A Daerah Irigasi Pengasih

Sejarah irigasi yang panjang di Indonesia telah memberi kesempatan bagi petani untuk menumbuhkan kelembagaan-kelembagaan pengelola air irigasi secara tradisional. Namun, lembaga-lembaga yang teramat penting tersebut sering tidak dimengerti oleh mereka-mereka yang bukan anggotanya, terutama jika organisasi tersebut tidak berbentuk formal seperti organisasi-organisasi yang dipromosikan oleh pemerintah. Lembaga petani pengelola air tradisional yang paling dikenal di Indonesia adalah Subak di Bali, kemampuannya dalam mengelola air dengan efisien telah lama diakui (Dina, 2002).

Di Indonesia irigasi dibedakan antara irigasi yang dikelola oleh petani dan irigasi yang dikelola oleh pemerintah. Irigasi yang dikelola oleh petani dulu disebut "Irigasi Tradisional", tetapi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku resminya disebut "Irigasi Pedesaan" atau "Irigasi Desa". Irigasi tersebut dibangun dengan tanpa bantuan dari pemerintah dan dikelola sepenuhnya oleh petani yang bersangkutan. Irigasi sejenis ini dapat disebut "Irigasi Petani". Di negara lain irigasi petani dikenal dengan istilah "*Communal Irrigation*" (Filipina), "*Minor Irrigation*" (India), "*Small And medium, Scale Irrigation*" (Maroko).

Luas sawah irigasi yang berada di bawah pengawasan Dinas PU sekarang diperkirakan meliputi 3.818.657 hektar. Jaringan-jaringan ini berangsur-angsur akan diserahkan kepada organisasi petani formal, yaitu P3A. Dengan demikian, sebagian irigasi yang dikelola oleh Dinas PU akan beralih menjadi irigasi petani. Setelah program penyerahan itu selesai, diperkirakan irigasi petani akan

menjadi lebih kurang 40 persen dari seluruh sawah irigasi di Indonesia (John S. Ambler, 1992: 5).

P3A merupakan organisasi sosial dari petani, yang tidak bernaung pada golongan/partai politik dan merupakan organisasi yang bergerak dibidang pertanian, khususnya dalam kegiatan pengelolaan air sehubungan dengan kepentingan-kepentingan melangsungkan usaha tani bersama (A.G Karta Sapetra dan Mulyani, 1990: 178). Selama ini pemerintah mengambil peran yang semakin aktif dalam memajukan pengembangan organisasi P3A. Program pengembangan organisasi P3A merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan petani memikul tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas irigasi.

Menurut Soediro yang dikutip oleh John S. Ambler (1992: 61), untuk mencapai efisiensi pemanfaatan air irigasi di tingkat usaha tani maka dibentuk suatu organisasi yang dinamakan P3A yang tahap demi tahap akan berkembang menjadi suatu unit yang secara organisatoris, teknis, dan finansial mampu melaksanakan tugas dan kewajiban pembangunan, rehabilitasi, eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi serta bangunan pelengkapanya dalam petak tersier dan irigasi pedesaan.

Untuk mengidentifikasi kondisi baik buruknya persepsi masyarakat terhadap peranan P3A yang selama ini telah dilakukan oleh organisasi tersebut telah ditetapkan kriteria ideal. Berdasarkan skor data dan penelitian yang menggunakan skala likert 1 sampai 4 diperoleh mean ideal ($M_i = \frac{1}{2}(\text{skor total tertinggi} + \text{skor total terendah})$) sebesar 75 dan standar deviasi ideal ($Sd_i = \frac{1}{6}(\text{skor total tertinggi} - \text{skor total terendah})$) sebesar 15. Baik buruknya persepsi masyarakat terhadap peranan P3A menurut Sutrisno Hadi (1992: 35), dapat diketahui dengan mengkategorikan skor reratanya sebagai berikut:

Tabel 1. Kategori Skor Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Organisasi P3A

NO	Kelas Interval Skor	Kategori
1	≤ 52,50	Tidak baik
2	52,50 – 74,99	Kurang baik
3	75,00 – 97,49	Cukup baik
4	≥ 97,50	Baik

Dari hasil perhitungan statistik deskriptif ditemukan mean hitung persepsi masyarakat terhadap peran organisasi P3A adalah 99, 82. Kalau dikonfirmasi dengan kriteria kecenderungan tersebut di atas, persepsi anggota P3A terhadap peran organisasi P3A tergolong baik.

Peran Perempuan dalam P3A

Peranan merupakan segi dinamis daripada kedudukan. Di dalam kehidupan masyarakat, individu menerima suatu kedudukan dan mendudukinya di dalam hubungan dengan kedudukan-kedudukan lainnya. Apabila ia melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang melekat pada kedudukan itu, maka ia berarti melakukan sebuah peranan (Sri Sumardiningstih, 1999:16).

Untuk melihat sejauh mana peran perempuan dalam organisasi P3A rerata hitung dikonfirmasi dengan kategori skor persepsi masyarakat terhadap peran perempuan dalam P3A (lihat tabel 1). Rerata hitung persepsi masyarakat terhadap peran perempuan dalam pengelolaan irigasi adalah 74,59. Kalau dikonfirmasi dengan kategori kecenderungan sebagaimana tercantum dalam tabel 1 di atas berarti masuk pada kategori kurang baik. Untuk melihat sejauh mana persepsi masyarakat terhadap subvariabel peran perempuan dalam P3A selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 2. Ada 5 (lima) subvariabel peran perempuan dalam P3A, yaitu: keanggotaan petani perempuan

dalam P3A (X6); hak dan kewajiban petani perempuan dalam P3A (X7); petani perempuan sebagai pelaksana teknik (X8); perempuan sebagai ketua blok (X9); total persepsi masyarakat terhadap peran perempuan dalam P3A (X10)

Tabel 2. Kategori Skor Subvariabel Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Perempuan Dalam P3A

NO	Interval Skor	Kategori	Jumlah Respon den X6	Jumlah Respon den X7	Jumlah Respon den X8	Jumlah Respon den X9	Jumlah Respon den X10
1	<52,5	Tidak baik	2	2	8	11	7
2	52,5 -74,49	Kurang baik	3	4	7	2	4
3	75,00-97,49	Cukup baik	12	5	5	3	6
4	>97,5	Baik	5	11	2	6	5
			22	22	22	22	22

Sumber: Data primer yang diolah

Keterangan:

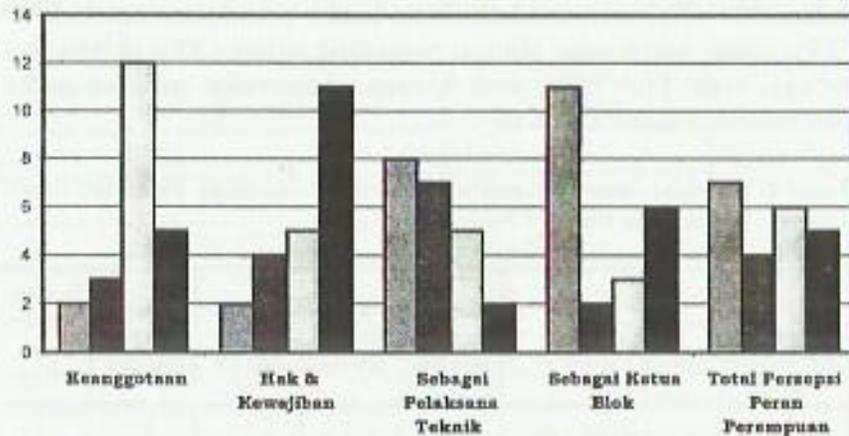
X6 adalah keanggotaan petani perempuan dalam P3A

X7 adalah hak dan kewajiban petani perempuan dalam P3A

X8 adalah petani perempuan sebagai pelaksana teknik

X9 adalah petani perempuan sebagai ketua blok

X10 adalah total persepsi masyarakat terhadap peran perempuan dalam P3A



Gambar 1. Kategori Subvariabel Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Perempuan dalam P3A

■ 1 < 52,5 Tidak baik
 ■ 2 52,5 - 74,49 Kurang baik
 ■ 3 75,00 - 97,49 Cukup baik
 ■ 4 > 97,5 Baik

Profil Keterlibatan Perempuan dalam Kelembagaan P3A

Perempuan di berbagai bidang kehidupan kondisi dan statusnya umumnya relatif lebih rendah dari kaum laki-laki. Oleh karena itu upaya-upaya pemberdayaan (*empowerment*) perempuan terus dilakukan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. *Empowerment* yang berasal dari kata *power* berarti kekuasaan atau kekuatan sehingga pemberdayaan atau *empowerment* dimaksudkan sebagai penguasaan atas material, sumber-sumber intelektual dan ideologi (Trias Setiawati, 2002): 1) Material, meliputi fisik, manusiawi atau finansial, tanah, hutan, tubuh manusia, pekerjaan, uang, akses pada uang; 2) Sumber intelektual, meliputi pengetahuan, informasi dan ide; 3) Ideologi,

meliputi mengembangkan, menyebarkan, mempertahankan dan mempranatakan perangkat tertentu dari kepercayaan, nilai, sikap, perilaku dan persepsi (sosial, ekonomi, politik).

Keterlibatan perempuan dalam organisasi P3A sangat terbatas, namun mereka pada umumnya mempunyai penilaian yang positif atas keberadaan P3A di wilayahnya. Keterlibatan perempuan dalam organisasi dan dalam pelaksanaan program P3A sebagai berikut:

Tabel 3. Profil Keterlibatan Perempuan dalam P3A Sebelum dan Pasca Pemberdayaan

Bentuk keterlibatan	Sebelum Pemberdayaan *		Pasca Pemberdayaan** (sekarang)	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Anggota P3A	✓	-	✓	✓
Pengurus P3A:				
- Ketua	✓	-	✓	-
- Sekretaris	✓	-	✓	✓
- Bendahara	✓	-	✓	✓
- Seksi	✓	-	✓	-
Rapat-rapat	✓	-	✓	✓
Pelaksanaan Program:				
- Pembagian air	✓	-	✓	-
- Pembenahan Saluran	✓	-	✓	-
- Membersihkan Saluran	✓	✓	✓	✓
- Membayar iuran	✓	✓	✓	✓
- Pelatihan P3A	✓	-	✓	✓
Penyuluhan P3A	✓	-	✓	✓
- Pemanfaatan kas kelompok	✓	-	✓	✓
- Pemanfaatan inventaris	✓	-	✓	-

Sumber: * Hasil Penelitian Kumara Dewi 2003

** Data Primer yang diolah 2005

Dari tabel 3 di atas menunjukkan keterlibatan perempuan secara relatif dibanding laki-laki meningkat sesudah dilaksanakan upaya pemberdayaan melalui pelatihan penyadaran gender bagi P3A/GP3A dan instansi terkait, penataan kembali organisasi P3A/GP3A, pengembangan program P3A/GP3A menjadi berperspektif gender. Peningkatan keterlibatan perempuan dalam P3A nampak pada bentuk keterlibatan sebagai anggota P3A, sebagai pengurus terutama sebagai sekretaris, sebagai bendahara, sebagai pelaksanaan program, terutama membersihkan saluran air, membayar iuran, pelatihan P3A, penyuluhan P3A, dan pemanfaatan kas kelompok. Meskipun sudah ada peningkatan keterlibatan perempuan dalam organisasi P3A, namun masih kental *stereotype* perannya, yakni sebagai sekretaris dan bendahara serta seksi konsumsi dalam kerja bakti pembersihan saluran air.

Menurut Waiten (1992) dalam Trias Setiawati (2002) pemahaman tentang peran gender terbentuk melalui tiga proses, *operant conditioning, observation learning, self-socialization*. *Self-socialization* berkembang melalui tiga tahap, yaitu: (a) anak belajar mengklasifikasikan dirinya sebagai pria atau perempuan dan memahami jenis kelaminnya sebagai sesuatu yang permanen, (b) anak melakukan penilaian terhadap karakteristik dan perilaku yang berkaitan dengan jenis kelaminnya, (c) mereka mengusahakan perilaku yang tetap sesuai dengan peran gender yang dianggap tepat dalam budayanya.

Peran gender menjadi sangat bervariasi dalam pola kehidupan tiap orang, tiap keluarga juga tiap budaya maupun Negara. Namun budaya yang cenderung sangat patriarkhis sering menimbulkan ketidakadilan gender, yang cenderung merugikan kaum perempuan. Keputusan masyarakat pada umumnya lebih banyak di tangan laki-laki, sering kepentingan perempuan relatif kurang diperhatikan, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan gender. Ketidakadilan tersebut muncul dalam berbagai bentuk antara lain: subordinasi perempuan, marginalisasi

peranan perempuan, *stereotype* perempuan, beban kerja yang berlebihan, dan tindak kekerasan terhadap perempuan.

Akses dan kontrol atas sumberdaya pertanian

Guna melihat seberapa jauh kedudukan dan peran perempuan secara relatif dibanding dengan kedudukan dan peran laki-laki bisa dilakukan dengan *analisis gender*.

Analisis Gender terdiri dari 4 komponen (Parker, Rani, 1993):

- Sex Disaggregation*: seluruh data harus dipisah dengan jenis kelamin dalam rangka memiliki data yang bentuknya dapat memungkinkan analisis hal-hal yang mempengaruhi perempuan secara terpisah dari hal-hal yang mempengaruhi laki-laki.
- Social Construction*: Komponen ini harus dapat memahami bagaimana sejarah dan keadaan sosial yang mensubordinasi perempuan, seringkali terbentuk melalui dominasi seksual, bahasa dan mitos tentang "kejahatan" atau "kesempurnaan" perempuan. Konsep maskulinitas dan feminitas yang terus mengalami perubahan sepanjang sejarah dan dirubah oleh masyarakat.
- Divisions of Labor*: Bagaimana masyarakat mengatur peran gender yang mempunyai pengaruh penting pada jenis pekerjaan yang harus dikerjakan oleh perempuan dan laki-laki, dan bagaimana pekerjaan itu dihargai. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan bervariasi dalam setiap budaya, antar budaya dan berubah sepanjang waktu. Jadi tidak ada yang "alami" ditentukan oleh masyarakat. Analisis gender memberikan pemahaman bagaimana pembagian kerja berpengaruh pada keadilan.
- Access/Kontrol*: Konsep ini menekankan pentingnya perbedaan antara akses (untuk dapat bertani pada tanah seseorang) dan kontrol (memiliki tanah, dan dapat memutuskan bagaimana menggunakan tanah itu). Meskipun perempuan dapat mengakses sumberdaya, tetapi jika mengalami kesenjangan kontrol, maka mereka akan hanya memiliki suara kecil ketika

suatu keputusan dibuat, atau sumber daya itu ditekan. Membuat perempuan memiliki kontrol berarti membuat perempuan mampu ikut berperan dalam produksi dan proses pembuatan keputusan sebagai kunci terjadinya perubahan.

Akses dan kontrol atas sumberdaya usaha pertanian perlu diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Sumberdaya pertanian antara lain terdiri dari faktor-faktor produksi yaitu lahan, modal (kredit), teknologi termasuk peralatan dan informasi adalah merupakan sesuatu yang teramat penting bagi petani dalam menjalankan usaha tani.

Tabel 4. Profil Akses dan Kontrol Suami dan Istri atas Sumberdaya Pertanian di Daerah Irigasi Pengasih Sebelum dan Pasca Pemberdayaan

Sumberdaya	Akses				Kontrol			
	Sebelum * Pemberdayaan		Pasca ** Pemberdayaan		Sebelum * Pemberdayaan		Pasca ** Pemberdayaan	
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
Tanah	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
Kredit	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	-
Teknologi	✓	-	-	-	✓	-	✓	-
Informasi	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-
Pelatihan	✓	-	✓	✓	-	-	-	-
Irigasi	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
Pupuk	-	-	✓	✓	-	-	✓	-
Bibit	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-
Obat	✓	✓	✓	✓	pasar	-	✓	-
Tenaga Kerja	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Pemasaran	-	-	✓	✓	-	-	-	-
Anggota Kop	-	-	✓	-	-	-	-	-

Sumber: * Hasil Penelitian Kumara Dewi dkk 2003

** Data Primer yang diolah 2005.

Ket: Lk= Laki-laki, Pr = Perempuan

Dari tabel 4 nampak bahwa ada peningkatan akses perempuan terhadap sumberdaya pertanian dibandingkan antara sebelum dan pasca upaya pemberdayaan. Peningkatan akses terjadi

pada sumberdaya: kredit, pelatihan, pupuk, dan pemasaran. Sedang untuk kontrol masih tetap tidak ada peningkatan. Petani laki-laki tetap memegang kontrol terhadap sumber daya pertanian seperti tanah, kredit, teknologi, informasi, pupuk, bibit, dan obat.

SIMPULAN

1. Persepsi masyarakat terhadap peran organisasi P3A tergolong baik.
2. Dalam organisasi P3A perempuan sudah mulai mengambil peran dalam organisasi P3A (pengelola irigasi). Hal ini dibuktikan dengan mulai adanya anggota dan pengurus perempuan dalam organisasi tersebut. Di mana pada tahun 2002, belum ada satupun perempuan yang masuk sebagai anggota apalagi sebagai pengurus P3A.
3. Petani perempuan dalam organisasi P3A dipersepsikan kurang baik perannya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya di kepengurusan organisasi. Terutama dalam perannya sebagai pelaksana teknik dan sebagai ketua blok. Adapun untuk peran sebagai anggota dan pelaksana hak dan kewajiban, perempuan dipersepsikan cukup baik.
4. Ada peningkatan peran perempuan dalam organisasi P3A (pengelola irigasi) sebelum dan sesudah dilaksanakan upaya pemberdayaan peran perempuan dalam pengelolaan irigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2001). Kajian Pemberdayaan Peran Perempuan Dalam Melaksanakan Pembaharuan PKPI. Yogyakarta: Kerangka Acuan Kerja.
- Dinas Pekerjaan Umum. (1992). Pedoman Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kecil. Yogyakarta: CV. Dua Intan bersatu.

Dina Dyah Sari Rahmah. (2002) Persepsi Masyarakat Terhadap Peranan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dengan Isu Gender di Daerah Irigasi Simo Kabupaten Gunungkidul. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta

John S. Ambler. (1992). *Irigasi di Indonesia*. Jakarta: LP3ES

Kumara Dewi dkk. (2003). Kajian Keterlibatan Perempuan dalam Pengelolaan Irigasi di DI Papah dan DI Kasihan Kabupaten Kulonprogo. *Laporan Penelitian*. Universitas Wangsa Manggala

Mansour Fakih. (1997). *Konsep Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Parker, Rani., (1993) *Training Manual. Another Point of View: A Manual on Gender Analysis Training of Grassroots Workers*. UNIFEM, USA

Sri Sumardingsih, Nahiyah J.F., (1999). Profil Kedudukan dan Peranan Wanita Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1997/1998. *Laporan Penelitian*, Kerjasama Pemda Tingkat II Sleman dengan Pusat Studi Wanita IKIP Yogyakarta.